SELAMATKAN ANAK DARI BULLYING DI SEKOLAH

Ringkasan Eksekutif

Bullying di sekolah merupakan ancaman serius yang terus menggerogoti rasa aman dan hak anak untuk belajar dan berkembang. Berbagai kasus kekerasan yang viral—mulai dari pemukulan siswa SMP di Cilacap, kasus kematian di Grobogan, hingga insiden bom rakitan di SMAN 72 Jakarta yang melibatkan korban bullying—menunjukkan bahwa ekosistem sekolah belum mampu memberikan perlindungan yang memadai. Data KPAI semakin menegaskan urgensi ini, dengan mencatat 1.052 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2025, di mana 165 terjadi di sekolah dan 26 di antaranya menelan korban jiwa. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak pendidikan, kesehatan mental, dan perkembangan sosial anak, serta menunjukkan bahwa praktik pencegahan maupun penanganan belum berjalan efektif.

Analisis menunjukkan bahwa maraknya bullying dipicu oleh sejumlah faktor utama: pola asuh keluarga yang tidak suportif, kesenjangan literasi digital antara anak dan orang tua, pengawasan sekolah yang belum memadai meski adanya Permendikbudristek 46/2023, serta minimnya layanan psikologis akibat defisit besar guru BK. Oleh karena itu, policy brief ini merekomendasikan tiga langkah strategis: penerapan screening psikososial awal dan periodik untuk mendeteksi risiko sejak dini, penetapan standar nasional keterlibatan orang tua dan rasio minimal guru BK atau psikolog, serta integrasi literasi digital anti-cyberbullying melalui PPKSP. Ketiga rekomendasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem sekolah yang aman, sehat, dan responsif sehingga anak dapat belajar dan tumbuh tanpa rasa takut.

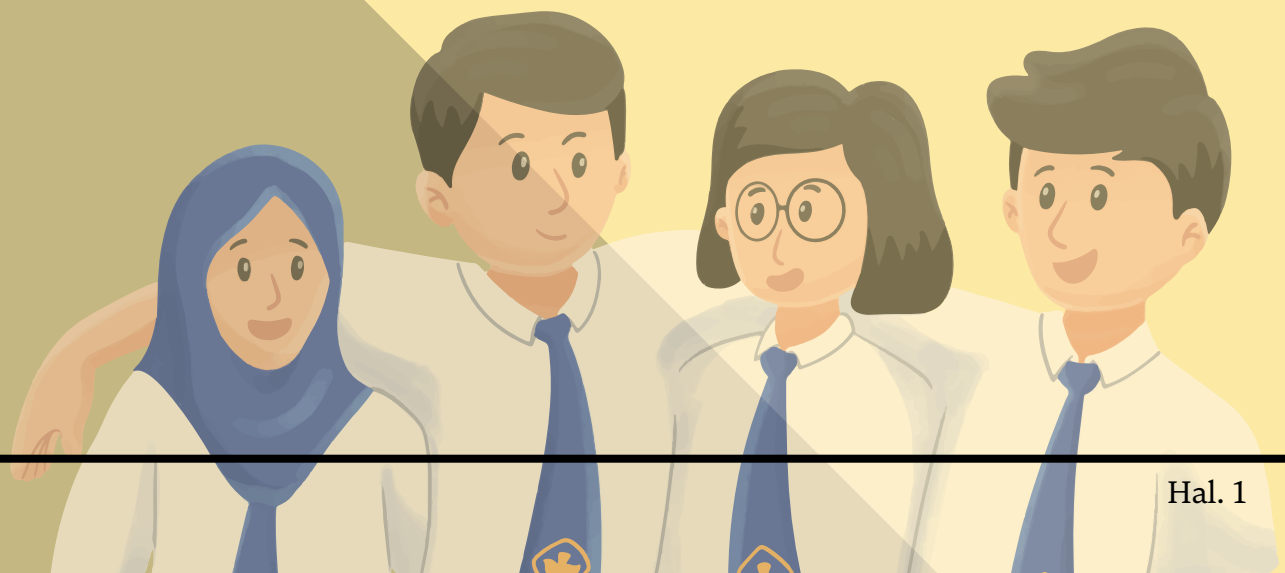

Masalah Utama

Sekolah semestinya menjadi tempat aman bagi anak untuk belajar. Namun, ada bahaya yang mengintai, yaitu bullying. Maraknya kasus bullying menjadi ancaman nyata bagi anak-anak. KPAI mencatat adanya 1.052 kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2025 dengan 165 di antaranya terjadi di sekolah. Sebanyak 26 kasus bullying di sekolah menelan korban jiwa. Bak gunung es, sekumpulan angka ini hanya kasus yang tercatat. Tidak ada yang tahu tepatnya seberapa banyak kasus bullying yang terjadi di sekolah. Didasari alasan reputasi institusi, masih terdapat sekolah yang berusaha menutupi alih-alih mengakui dan mengatasi bullying di lingkungannya.

Mengutip pernyataan Komisioner KPAI, Diah Puspitarini bahwa perilaku bullying merupakan sebuah siklus yang berulang. Tidak jarang pelaku semula merupakan korban bullying yang ketika naik kelas dan menjadi senior dia mem-bully juniornya. Perilaku ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses dialami dalam waktu yang lama. Anak-anak melihat perilaku kekerasan di dalam rumah, di lingkungan, mengalami ketidakpedulian, paparan negatif sosial media, keinginan untuk merasa 'berkuasa', dan berbagai faktor lainnya yang memicu tindakan bullying.

	Iya	Tidak
Apakah anak-anak mereka diperbolehkan memiliki akun pribadi di media sosial	64,6%	35,4%
Apakah orang tua 'berteman' dengan anak-anak mereka di media sosial	53,8%	46,2%
Apakah orang tua selalu tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka di ranah daring	69,9%	30,1%
Apakah anak-anak mereka menghabiskan terlalu banyak waktu di ranah daring	45,8%	54,2%
Apakah anak-anak mereka berdiskusi tentang aktivitas daring dengan mereka	43,8%	56,2%

Bullying is a crime

Layaknya tindak kejahatan lainnya, bullying memberikan dampak bagi pelaku terlebih korban. Keduanya berpotensi terhambat dalam pemenuhan pendidikan, waktu luang, budaya dan agama karena gangguan secara psikis maupun mengalami luka fisik. Tekanan yang dialami dapat membuat anak enggan bersekolah, sulit berkonsentrasi, kehilangan rasa percaya diri dan ruang aman, serta mengisolasi diri. Dengan kata lain, anak tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal.

Selain itu, akan muncul perilaku agresif yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Masih hangat di ingatan kita, viralnya video siswa SMP di Cilacap yang dibully sekelompok siswa hingga mengalami luka fisik pada 2023 silam. Baru-baru ini siswa kelas VII di Grobogan yang melawan saat di-bully justru mengakibatkan nyawa pelaku melayang, serta kasus peledakan bom rakitan di SMAN 72 Jakarta dimana terduga pelaku adalah korban bullying. Mereka, anak-anak yang menjadi masa depan bangsa, terganggu hak-nya oleh ekosistem yang tidak dapat memberikan ruang aman.

Penyebab Masalah

1

Pola Asuh Keluarga yang Kurang Supportif

Hasil penelitian di salah satu SMA, menunjukan responden dengan pola asuh otoriter cenderung menjadi pelaku bullying sebesar 57,1%. Pola asuh otoriter menekankan pada kontrol yang kuat dari orang tua pada anak dan mengharuskan kepatuhan anak pada orang tua. Orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan emosional anak, anak dituntut untuk menuruti orang tua tanpa diberikan ruang untuk mengekspresikan keinginannya. Anak yang terbiasa mendapatkan perilaku demikian, cenderung memiliki potensi besar terlibat dalam perilaku bullying.

2

Kesenjangan Literasi Digital Orang Tua dan Anak

Studi yang dilakukan UNICEF mengungkap sebanyak 99% anak telah menggunakan internet dengan 98,6% akses dari rumah. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa cyberbullying merupakan perilaku daring negatif yang paling umum dialami oleh anak-anak. Hanya sepertiga dari total anak dan sepertiga dari total orang tua sebagai responden yang mendapatkan informasi tentang keamanan digital. Mayoritas aturan yang diberlakukan orang tua adalah waktu ber-internet bagi anak. Kurangnya pengawasan dan literasi digital membuat anak rentan terpapar bahaya daring seperti cyberbullying, pornografi, atau penyalahgunaan data.

3

Pengawasan Sekolah Belum Memadai

Permendikbudristek 46/2023 telah mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, namun dinilai masih bersifat administratif dan lebih menitikberatkan pada tindak penanganan. Sebuah studi di SMA di Semarang menunjukkan bahwa sekolah dengan TPPK tetap mengalami bullying dan kekerasan karena TPPK belum dilengkapi keterampilan dan fungsi nyata. Beratnya beban teknis guru membuat tidak optimalnya pengawasan di sekolah.

Studi di Australia menunjukkan bahwa ada lokasi dalam sekolah yang menjadi blind spot seperti toilet, lorong, koridor yang kerap menjadi tempat bullying. Faktor lingkungan fisik sekolah memengaruhi seberapa besar pengawasan bisa dilakukan.

4

Minimnya Layanan Psikologis dan Konselor di Sekolah

Kemenko PMK mengungkap Indonesia hanya memiliki sekitar 58 ribu guru BK untuk 45 juta murid. Idealnya 1 guru BK untuk 150 murid. Dengan demikian terdapat defisit sekitar 242 ribu guru BK. Sehingga bukan lagi konseling yang diberikan, namun respon reaktif ketika ada kasus. Apalagi layanan psikologis yang hanya bisa diperoleh pada sekolah-sekolah swasta bonafite. Padahal masalah psikis pada anak sangat berdampak pada perkembangannya. Penelitian internasional telah menunjukkan rendahnya empati sebagai pemicu kuat perilaku bullying, serta ketidakmampuan memahami & mengelola emosi yang meningkatkan perilaku bullying.

Rekomendasi Kebijakan

1

Penguatan Kebijakan Zero Bullying (Permendikbudristek 46/2023) dengan **screening di awal masuk sekolah dan secara periodik** bagi siswa dan orang tua.
Kemdikdasmen perlu menambahkan instrumen screening psikososial awal tahun dan screening periodik, minimal setiap tahun ajaran baru sebagai bagian dari pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, karena Permendikbudristek 46/2023 belum mengatur asesmen tersebut secara eksplisit. Hasil screening perlu ditindaklanjuti dengan treatment yang tepat secara kolaboratif bersama orang tua. Metode screening yang merupakan bagian dari program anti perundungan telah diterapkan di sekolah di Finlandia sejak 2009 dan hal ini berhasil mengurangi frekuensi bullying bahkan memiliki efek positif pada motivasi akademik siswa.

2

Penetapan standar nasional tentang **standar minimal keterlibatan orang tua dan pemenuhan standar jumlah guru BK atau psikolog di setiap sekolah**.
Selama ini, tingkat partisipasi orang tua sangat bervariasi antar sekolah, padahal peran keluarga merupakan benteng pertama dalam membentuk karakter, perilaku sosial, dan kemampuan anak mengelola konflik. Dengan standar tersebut, sekolah wajib menyediakan wadah keterlibatan orang tua—seperti kelas parenting berkala, komunikasi rutin terkait perkembangan anak, hingga pendampingan resmi saat terjadi kasus bullying. Di sisi lain, pemenuhan standar jumlah guru BK atau psikolog menjadi kebutuhan mendesak mengingat beban konseling yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, yang menyebabkan banyak masalah psikologis maupun kasus bullying tidak terdeteksi sejak awal. Penetapan rasio minimal, misalnya satu guru BK untuk setiap 150-200 siswa atau penyediaan psikolog untuk kelompok beberapa sekolah kecil, akan memastikan setiap anak memiliki akses yang memadai pada dukungan emosional dan penanganan profesional.

3

Integrasi literasi digital melalui PPKSP untuk membekali siswa dan orang tua dengan etika online dan pencegahan cyberbullying.
Untuk mencegah terjadinya cyberbullying dan berbagai bentuk kekerasan di dunia digital, sekolah perlu memasukkan program literasi digital secara resmi ke dalam kegiatan belajar sehari-hari. Artinya, setiap sekolah memiliki standar minimal waktu khusus yang digunakan untuk mengajarkan siswa tentang etika berinternet, cara berkomunikasi yang baik di media sosial, bagaimana melindungi diri dari perundungan online, serta cara melapor jika terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan mereka. Program ini ditujukan untuk siswa dan orang tua agar mereka memahami cara mengawasi penggunaan gadget di rumah dan mendampingi anak dalam beraktivitas secara digital. Dengan cara ini, murid dan orang tua memiliki bekal pengetahuan yang sama, sehingga mereka lebih siap mencegah dan menanggulangi risiko cyberbullying di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Referensi:
KPAI. (2025). Laporan Tahunan KPAI.
Muller, K., Dionisio, A. G., & Park, S. (2023). Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Orang Tua dan Anak-Anak di Indonesia.
Murtosiah, S., & Arrochman, I. (2025). Identifikasi Penyebab Maraknya Bullying dalam Dunia Pendidikan dan Formulasi Solusi Efektif bagi Korban. TAUJIH Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 30-51. https://doi.org/https://doi.org/10.53649/taujih.v6i02.889
Poskiparta, E., Salmivalli, C., & Ka, A. (2011). Counteracting bullying in Finland : The KiVa program and its effects on different forms of being bullied. 35(5), 405-411. https://doi.org/10.1177/0165025411407457
Rasmita, D., & Pasaribu, Y. (2024). Studi Literatur Faktor-Faktor Terjadinya Perilaku Perundungan Pada Remaja di Indonesia. 4, 348-362.
Rozy, Y., Fitriyana, P., Murdiani, D., Hanifah, L., & Solihin, L. (2025). Menumbuhkan Budaya Pendampingan: Potret Implementasi Awal Program 7 Jurus BK Hebat dan Kebijakan Guru Wali di Sekolah. https://www.youtube.com/watch?v=AdGL6ocPfwU

Disusun oleh:
Lukita Werdhani

Magister Ilmu Administrasi Publik
DMKP FISIPOL
Universitas Gadjah Mada
2025